
PRAKTIK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

Sri Rahayu¹⁾, Yudi^{2*)}, Rahayu³⁾ dan Muhammad Ridwan⁴⁾

Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi^{1,2*,3,4)}

Jalan Raya Jambi Muara Bulian KM 15, Mendalo Darat, Jambi, Indonesia

E-mail: yudi.telanai@gmail.com

Abstract

This study aimed to describe the implementation of the Internal Control System on the school financial management. Internal control was the designed process to provide a sufficient confidence towards the achievement of goals, the effectivity of applied programs and activities, and its obedience to the law. The elements of Internal Control System consisted of control environment, risk analysis, control activities, monitoring, information and communication. Qualitative data analysis was administered in this study. Data were collected by using questionnaires, interviews, and focus group discussion. The result showed that the implementation had been identified as appropriate. The highest implementation level was on the control environment, whereas the lowest was on the monitoring. Some reasons inhibited the optimization of the Internal Control System like the limitation of human resources, internal auditors, school financial management supervisors, and the disorganized documentation toward the Internal Control System implementation.

Keywords: *Control Environment, Risk Analysis, Control Activities, Information and Communications*

Abstrak

Studi ini bertujuan mengungkap praktik sistem pengendalian internal (SPI) pengelolaan keuangan di sekolah. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan. Unsur-unsur SPI terdiri dari lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan *focus group discussion*. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan pengendalian internal pengelolaan keuangan sekolah di Kota Jambi sudah baik. Penerapan tertinggi pada unsur lingkungan pengendalian, sedangkan penerapan terendah pada unsur pemantauan. Penyebab SPI belum optimal diterapkan antara lain karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan auditor internal dan pengawas pengelolaan keuangan sekolah dan belum tertib dokumentasi penerapan SPI.

Kata kunci: **Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi**

1. Pendahuluan

Sistem pengendalian internal (SPI) yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Sudiarianti, 2015), sehingga laporan keuangan akan terhindar dari salah saji material (Rahayu & Rahayu, 2016). Kurniawan (2015) menyatakan bahwa SPI yang diterapkan dengan baik akan mampu mengarahkan proses, perilaku, tugas, kebijakan dan aspek lain dalam organisasi sehingga manajemen organisasi dapat memberikan keyakinan kualitas pelaporan untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, andal dan relevan. Lemahnya SPI akan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kualitas pelaporan keuangan di seluruh unit pemerintah daerah (Indriasih, 2014).

SPI sangat diperlukan dalam suatu proses pengelolaan keuangan baik organisasi pemerintah maupun swasta. SPI organisasi pemerintah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPI merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan integral oleh pimpinan organisasi dan seluruh pegawai dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.

Tujuan utama SPI bagi organisasi pemerintah adalah melindungi aset (termasuk data) negara, memelihara catatan secara rinci dan akurat, menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal, mencapai efisiensi dan efektivitas operasi dan menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahmudi, 2010). SPI dinyatakan efektif bila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan laporan keuangan, keamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPK, 2015).

Sekolah merupakan salah satu organisasi pemerintah yang saat ini juga dituntut untuk menerapkan pengendalian internal yang baik, karena sekolah juga mengelola dana baik yang bersumber dari alokasi anggaran pemerintah pusat maupun daerah serta bersumber dari masyarakat. Sekolah menjadi organisasi pemerintah yang mengemban pelaksanaan amanah UUD 1945 terkait hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga merupakan kewajiban bagi warga negara di Indonesia.

Setiap warga negara wajib yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6, UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan dasar di Indonesia berbentuk SD/MI dan SMP/MTS (Pasal 17, UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan dasar merupakan pintu masa depan generasi muda, oleh karena itu sangat penting untuk diperhatikan (Kasali, 2014).

Pendidikan berkontribusi secara langsung terhadap kualitas dan masa hidup bagi masyarakat (Lanjouw, Pradhan, Saadah, Sayed, & Sparrow, 2001), karena melalui pendidikan masyarakat dapat memperoleh keterampilan baru (Huffman, 2001), sehingga produktivitas dan kinerja dapat ditingkatkan (Schultz, Tansel, & Mundial, 1993). Seseorang akan lebih mudah memperoleh pendapatan apabila memiliki pendidikan dan keterampilan (Lanjouw et al., 2001; Saraswati, 2011).

Sekolah saat ini bukan hanya sebagai penyelenggara pendidikan saja. Sejak pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2003 dan pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2005, sekolah juga dituntut mampu mengelola dana secara efektif dan efisien. Manajer sekolah yaitu kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Sekolah menjadi penerima amanah mengelola dana masyarakat untuk menjalankan aktivitas pendidikan. Sudut pandang *Agency Theory* memandang sekolah sebagai agen, sedangkan masyarakat sebagai prinsipal. Awal pengembangan *Agency Theory* oleh (Jensen & Meckling, 1976) pada organisasi swasta. Masalah hubungan antara agen dan prinsipal juga terjadi pada lembaga pemerintah. Halim and Abdullah (2006) menyatakan bahwa masalah keagenan di pemerintahan daerah berlangsung secara terus menerus dan saling terkait pada semua tingkatan. Sekolah sebagai penerima amanah, sekolah harus mengelola dana secara akuntabel dan transparan. Sekolah memang tidak bisa lepas dari lingkungannya, karena sekolah dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya (Sri Rahayu, 2016).

Pengendalian internal sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia. Selain itu, kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai aturan juga diharapkan dapat di minimalisir. Organisasi pemerintah di Indonesia menerapkan unsur-unsur pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008. Lima unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Penerapan pengendalian internal di sekolah, akan berdampak pada pengelolaan keuangan sekolah yang efektif dan efisien. Akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan di sekolah belum banyak diteliti di Indonesia. Penelitian pada lembaga pendidikan selama ini lebih banyak melihat pada aspek akademis seperti kurikulum dan proses pembelajaran. Padahal pengelolaan keuangan juga menjadi aspek penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas.

Sri Rahayu (2016) menyatakan bahwa sekolah berusaha mengikuti semua perubahan kebijakan pengelolaan keuangan. Strategi yang dilakukan melalui studi banding, bekerja secara kelompok dan menggunakan tenaga konsultan. Sekolah berusaha untuk tampil homogen agar mendapat dukungan dari lingkungannya. Pengendalian internal sangat penting untuk menjamin pengelolaan keuangan telah dilakukan secara baik. Halimah (2009) membuktikan bahwa pelaksanaan pengendalian internal di sekolah akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. (Defriyan, 2010) juga membuktikan bahwa kualitas pengendalian yang baik memiliki hubungan terhadap capaian standar pelayanan minimum.

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis Praktik sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian tentang pengelolaan keuangan sekolah belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian di sekolah saat ini masih dominan terkait dengan kurikulum dan akademik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk dapat mengeksplorasi secara mendalam praktik sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan di sekolah.

Objek penelitian ini adalah praktik pengendalian internal sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Jambi tersebar pada 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kota Jambi. Jumlah sampel adalah 139 sekolah. Penarikan sampel ini dilakukan untuk penetapan responden yang akan mengisi kuesioner. Penetapan sekolah yang akan dijadikan sampel dipilih secara random.

Berdasarkan data populasi lembaga pendidikan dasar negeri di atas, maka digunakan penarikan sampel dengan metode cluster sampling. Pengambilan sampel secara kluster dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian (Jogiyanto, 2010, 2010). Jenis sampel kluster paling populer digunakan adalah sampel area. Metode sampel area bisa diterapkan untuk populasi nasional, provinsi kabupaten atau bahkan wilayah (Kuncoro, 2003).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode survei dengan kuesioner terkait dengan praktik SPI. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan berasal dari dokumen dan kebijakan yang relevan dengan topik kajian. Penguatan hasil pengolahan data kuesioner, dilakukan penggalian data dengan menggunakan wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD). Semua data tersebut diperoleh dari masing-masing sekolah dan instansi

terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Jambi Praktik Sistem Pengendalian Internal dinilai terdiri dari lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Operasional variabel dari masing-masing unsur tersebut mengacu ke PP No. 60 Tahun 2008. Kuesioner terkait penerapan pengendalian internal menggunakan skala likert. Tingkat penerapan praktik ditentukan berdasarkan rata-rata penerapan berdasarkan jawaban responden. Apabila rata-rata responden menjawab 1 (20%) maka dikategorikan sangat tidak baik, ≥ 2 (40%) kategori kurang baik, ≥ 3 (60%) kategori cukup baik, ≥ 4 (80%) kategori baik dan 5 kategori sangat baik. Hasil data kuesioner menjadi bahan untuk pelaksanaan FGD. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, semua item pertanyaan untuk unsur: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan dinyatakan valid dan reliabel.

Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif digunakan dalam menganalisis hasil data kualitatif dengan tahapan analisis data kualitatif mengacu kepada (S Rahayu, L, I, & Nurkholis, 2015) yaitu: 1) melakukan penyaringan data; 2) menetapkan tema; 3) menentukan keterkaitan antar tema dan 4) penetapan kesimpulan. Keabsahan data kualitatif diuji dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber. Triangulasi merupakan cara pengujian data kualitatif yang paling mudah (Merriam, 2002; Sri Rahayu, Ludigdo, & Irianto, 2015).

3. Hasil dan Pembahasan

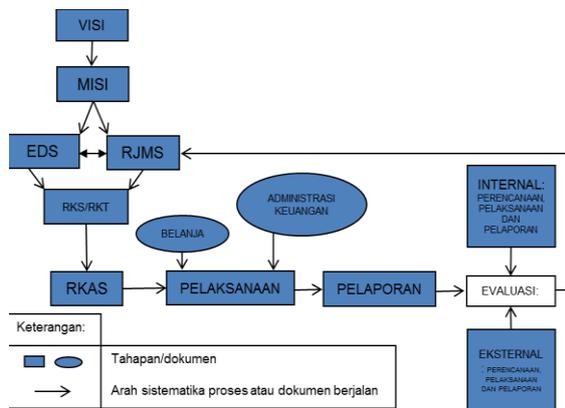
Alur Pengelolaan Keuangan Sekolah

Beberapa jenis dana yang dapat menjadi sumber keuangan sekolah yaitu dana bantuan pemerintah (Bantah), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN (pusat) dan Dana bantuan operasional sekolah dari APBD (daerah) serta pendapatan asli sekolah (PAS) (Sri Rahayu, Mukhzarudfa, & Yuliusman, 2016). Dana yang diterima oleh seluruh sekolah setiap tahunnya adalah dana BOS yang bersumber dari APBN dan PAS. Jumlah PAS setiap sekolah berbeda-beda, tergantung kepada kreativitas sekolah dalam menggali sumber pendapatan sekolah. Dana BOS dari APBD bentuknya berbeda-beda setiap daerah. Kota Jambi menyalurkan bantuan dana operasional ke sekolah dalam bentuk bantuan honorarium bagi sebagian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.

Tidak semua sekolah menerima dana Bantah dan DAK setiap tahun. Dana Bantah merupakan pengganti dari dana Bansos. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Bantah untuk kegiatan fisik dan *soft skill*. Kegiatan fisik berupa rehab ruang belajar, ruang kelas baru (RKB), dan unit sekolah baru

(USB). Kegiatan *soft skill* berupa pelatihan dan sosialisasi seperti *parenting*, peningkatan kompetensi guru K13, dan lain sebagainya. Dana alokasi khusus disalurkan oleh pemerintah pusat bagi percepatan pengembangan fasilitas umum di daerah khususnya yang berkaitan dengan urusan wajib pemerintah. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan pembangunan fasilitas umum lainnya seperti jalan.

Secara umum alur pengelolaan keuangan di sekolah dapat dilihat pada gambar 1 berikut. Secara ideal, sekolah harus menyusun Rencana kerja tahunan sekolah (RKS/RKT) setiap tahunnya. Penyusunan RKS/RKT berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah (EDS) dan Rencana Jangka Menengah Sekolah (RJMS). EDS dan RJMS di susun berdasarkan visi dan misi sekolah. RKS/RKT menjadi dasar Penyusunan Anggaran Sekolah yang sering disebut dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS menjadi dasar bagi sekolah untuk melaksanakan kegiatan dan pencairan serta penyusunan pertanggungjawaban dana. Laporan sumber dan penggunaan dana sekolah di susun sesuai sumber dana yang diperoleh. Khusus Dana BOS yang berasal dari APBN dan sumber dana operasional lainnya, setiap triwulan harus dilaporkan secara *on line* ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 1

Alur pengelolaan keuangan sekolah secara ideal

Praktik SPI Pengelolaan Keuangan Sekolah

Lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penetapan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan merupakan dimensi pengukuran skor praktik sistem pengendalian internal. Hasil statistik deskriptif dari jawaban sampel, diperoleh nilai rata-rata praktik sistem pengendalian internal adalah 4,49. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata praktik sistem pengendalian di SD lebih tinggi dibandingkan di SMP sama, yaitu masing-masing sebesar 4,55 dan 4,42. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPI pengelolaan keuangan sekolah di Kota Jambi sudah baik.

Selanjutnya, Tabel 1 memberikan informasi detail

terkait skor masing-masing unsur sistem pengendalian internal. Tabel ini memperlihatkan nilai rata-rata praktik SPI di SD untuk unsur penentuan risiko, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi lebih tinggi di dibandingkan di SMP, kecuali untuk unsur lingkungan pengendalian dan unsur pemantauan.

Tabel 1

Skor Unsur Praktik Sistem Pengendalian Internal

Keterangan	SD	SMP	Rata-Rata
Lingkungan Pengendalian	4,82	4,80	4,81
Penilaian Resiko	4,45	4,12	4,29
Aktivitas pengendalian	4,64	4,50	4,57
Informasi dan Komunikasi	4,66	4,43	4,55
Pemantauan	4,18	4,27	4,22

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur SPI pemerintah yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan untuk pemerintah daerah (Afiah & Rahmatika, 2014). Lingkungan pengendalian memiliki dampak yang pervasif pada cara penyiapan laporan keuangan (Sawyer, DITTENHOFER, Scheiner, & James, 2003). Lingkungan pengendalian menjadi pondasi untuk penerapan unsur-unsur SPI yang lain. Lingkungan pengendalian hanya akan berhasil jika orang-orang memiliki kompetensi yang baik, pengetahuan yang memadai, batasan wewenang yang jelas, mematuhi aturan yang ada dan memiliki komitmen yang tinggi. Pimpinan instansi menjadi penanggung jawab dan wajib untuk menciptakan serta memelihara lingkungan pengendalian yang baik, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh orang-orang pada setiap tingkatan organisasi (Sawyer et al., 2003).

Praktik lingkungan pengendalian pengelolaan keuangan sekolah di Kota Jambi sudah baik, dengan rata-rata penerapan pada skor 4,81. Unsur ini menjadi unsur yang rata-rata paling tinggi diterapkan. Hal ini didukung karena dalam pengelolaan keuangan sekolah sudah terdapat aturan seperti peraturan menteri, peraturan daerah serta kebijakan-kebijakan yang jelas. Setiap sekolah juga sudah memiliki struktur organisasi dan pembagian wewenang yang jelas. Salah satu bentuk kelemahan yang ditemukan untuk lingkungan pengendalian adalah tugas operator sekolah yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena hampir seluruh data sekolah, baik data akademik siswa, guru dan keuangan sudah menggunakan sistem aplikasi. Hal ini sering kali berdampak kepada keterlambatan pelaporan untuk beberapa sekolah. Selain itu, sebagian besar operator sekolah ini adalah tenaga kependidikan non PNS.

Penilaian Risiko

Setiap organisasi baik profit maupun non profit dalam kondisi apapun pasti menghadapi risiko dalam aktivitasnya (Kumaat, 2011). Risiko merupakan suatu kondisi yang mungkin terjadi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini tentu berakibat tidak tercapainya tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Saat ini, pengendalian internal tidak hanya terfokus pada fakta yang ada, tetapi lebih berbasis risiko (Kumaat, 2011).

Proses manajemen risiko sudah menjadi hal yang umum bagi organisasi berorientasi laba, namun masih belum optimal dilakukan pada organisasi pemerintah. Salah satu unsur pengendalian internal yang berkaitan dengan risiko adalah penetapan dan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan aktivitas yang diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas organisasi (Tunggal, 2014). Apabila risiko sudah dinilai, walaupun tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan, namun kemungkinan dapat diminimalisir dampak dari risiko tersebut bagi organisasi.

Praktik Penilaian risiko di sekolah masih belum optimal. Rata-rata penerapan unsur ini, merupakan terendah kedua dibandingkan penerapan unsur-unsur SPI yang lain yaitu 4,29. Berdasarkan hasil diskusi, kepala sekolah telah menerapkan pengelolaan risiko, walaupun belum teradministrasi dengan baik. Hal ini karena sebagian besar belum memahami tentang pentingnya penilaian risiko secara berkelanjutan. Risiko yang dominan telah di kelola dengan baik adalah risiko terkait kepada proses akademik pembelajaran siswa. Penilaian risiko keuangan, contohnya terkait dengan penilaian risiko pelaporan belum terbiasa dilakukan. Hal ini terjadi karena tidak ada keterkaitan antara pelaporan dengan proses pencairan dana berikutnya, khususnya untuk dana BOS yang bersumber dari APBN. Artinya keterlambatan penyampaian laporan sumber dan penggunaan dana tidak memiliki konsekuensi praktis terhadap pencairan dana periode selanjutnya. Padahal keterlambatan penyampaian laporan, akan berisiko terhadap keterlambatan laporan secara keseluruhan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Aktivitas Pengendalian

Pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen agar tujuan organisasi dapat tercapai (Tunggal, 2014). Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas (Boynton, Johnson, & Kell, 2003).

Pemisahan tugas yang cukup, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan

catatan serta pengecekan independen atas pelaksanaan merupakan indikator untuk unsur aktivitas pengendalian. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan perlu diperhatikan aktivitas pengendalian yang relevan yaitu mencakup pemisahan tugas, pengendalian pemrosesan informasi, pengendalian fisik dan reviu kinerja.

Pemisahan tugas diperlukan untuk tugas-tugas yang dapat menimbulkan tumpang tindih wewenang sehingga dapat mengganggu dan memungkinkan terjadinya kekeliruan atau kecurangan. Pemisahan tugas diperlukan untuk menjamin keterandalan data keuangan. Pemisahan tugas penting dilakukan antara bagian yang melakukan pencatatan aset dan pemegang atau pemelihara aset. Misalnya pemisahan tugas antara bagian mencatat kas dan pemegang kas.

Pengendalian pemrosesan informasi dibutuhkan untuk memberikan keyakinan bahwa sistem informasi yang digunakan aman, terjaga dan menghasilkan informasi yang valid dan akurat. Penilaian terkait akurasi, kelengkapan dokumen dan otorisasi menjadi beberapa contoh pengendalian pemrosesan informasi. Selain pemrosesan informasi, pengendalian fisik baik terhadap aset, catatan, dokumen dan *software* juga perlu diperhatikan. Pemberian nomor inventarisasi aset, penggunaan kartu inventaris barang, penggunaan bukti-bukti yang penerimaan dan pengeluaran kas yang terdokumentasi dengan baik merupakan contoh pengendalian fisik. Pemberian *password* terhadap aplikasi yang digunakan merupakan contoh pengendalian fisik untuk *software*.

Praktik aktivitas pengendalian dalam pengelolaan keuangan sekolah memiliki skor rata-rata tertinggi kedua setelah lingkungan pengendalian dibandingkan unsur-unsur SPI lainnya yaitu 4,57. Setiap sekolah telah memiliki struktur organisasi yang baik, sehingga pemisahan tugas dan wewenang sudah dapat dijalankan. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Petunjuk Teknis dikeluarkan untuk setiap jenis dana yang dialokasikan ke sekolah. Petunjuk teknis menjadi pedoman bagi pengelolaan keuangan sekolah, termasuk sebagai acuan pelaksanaan pengendalian internal sekolah. Dari sisi pengendalian fisik, pelaksanaan inventarisasi aset dan penggunaan kartu inventaris barang telah menjadi hal yang umum bagi organisasi pemerintah. Secara periodik, sekolah diminta melaporkan daftar inventaris aset yang dimiliki sekolah, serta tambahan belanja modal daerah pada periode yang bersangkutan. Hal ini untuk meningkatkan akurasi aset daerah, khususnya yang berasal dari belanja modal yang dilakukan oleh sekolah.

Informasi dan Komunikasi

Sistem yang memungkinkan orang-orang di dalam organisasi untuk saling menukar dan memperoleh

informasi yang diperlukan (Tunggal, 2014), agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sistem Informasi dan komunikasi perlu dirancang agar manajemen dapat memastikan bahwa unsur-unsur pengendalian yang lain telah diterapkan dengan baik. Selain pihak manajemen, pihak eksternal sekolah seperti komite, orang tua, dan masyarakat sekitar juga dapat membutuhkan informasi terkait sekolah sebagai salah satu dasar pengambilan Keputusan.

Apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, informasi dan komunikasi diperlukan untuk memastikan personel yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan memahami bagaimana aktivitas mereka memiliki kaitan dengan pekerjaan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi (Boynton et al., 2003). Komunikasi terkait sistem informasi keuangan perlu disampaikan ke seluruh organisasi. Komunikasi keuangan dapat berupa prosedur, aturan, kebijakan keuangan, daftar akun dan dokumen lainnya. Dari sisi akuntansi, dokumen dan catatan keuangan merupakan aspek dari sistem informasi dan akuntansi yang menyediakan bukti audit yang penting (Boynton et al., 2003).

Praktik informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan sekolah sudah baik, hal ini terbukti dengan rata-rata 4,55. Praktik informasi dan komunikasi ini didukung oleh penggunaan *software* khusus untuk administrasi pengelolaan keuangan sekolah, misalnya untuk pengelolaan keuangan dana BOS, sekolah diwajibkan menggunakan Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (ALPEKA). ALPEKA sudah mengakomodir pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggung jawaban. *Output* dari aplikasi ini adalah pelaporan yang dilakukan secara *on line*.

Sebagian besar sekolah juga telah menyampaikan informasi tentang sumber dan keuangan sekolah kepada *stakeholders* dengan berbagai bentuk. Ada sekolah yang telah menyampaikan informasi secara terbuka di papan pengumuman sekolah. Bentuk kedua, informasi disampaikan di papan pengumuman, namun papan pengumuman ditempatkan di ruang guru atau ruang kepala sekolah. Bentuk lain adalah sekolah menyampaikan informasi pada saat sosialisasi dalam rapat orang tua siswa.

Informasi keuangan sering kali menjadi pemicu saling curiga antara berbagai pihak di sekolah. Oleh karena itu, informasi dan komunikasi menjadi unsur penting bagi pengendalian yang efektif. Informasi harus dikomunikasikan bukan hanya ke atas tetapi juga ke bawah dan ke seluruh *stakeholders* yang terkait dengan aktivitas sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sekitar merupakan pihak eksternal yang harus diperhatikan sebagai penerima informasi dari sekolah. Keterbukaan informasi akan

mewujudkan *good school governance* khususnya terkait transparansi publik.

komunikasi di sekolah, karena keterbatasan kompetensi sebagian besar sumber daya di sekolah. Penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan, berkonsekuensi dibutuhkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi dan teknologi informasi. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang ini, di sekolah masih sangat terbatas. Sehingga operator sekolah menjadi tenaga kependidikan yang sangat diandalkan oleh sekolah.

Pemantauan

Pemantauan bertujuan untuk memantau pelaksanaan SPI. Pemantauan merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja SPI (Tunggal, 2014). Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui aktivitas secara berkelanjutan maupun secara periodik terpisah (Boynton et al., 2003).

Pemantauan dapat dilakukan oleh atasan langsung, pengawas atau auditor internal pemerintah daerah. Pemantauan di sekolah dapat juga dilakukan oleh komite sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. Kepala sekolah selaku manajer di sekolah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Praktik pemantauan merupakan unsur yang masih rendah diterapkan di sekolah yaitu pada skor rata-rata 4,22. Belum optimalnya pemantauan karena dari sisi kuantitas, jumlah sekolah khususnya sekolah dasar yang banyak, pengawas dan auditor internal masih terbatas. Berdasarkan hasil diskusi di lapangan, pengawas sekolah lebih fokus kepada pemantauan kegiatan akademik dan proses pembelajaran. Pengawas tidak terlibat aktif dalam pemantauan pengelolaan keuangan. Berkaitan dengan pengelolaan dana, pengawas hanya memantau dari sisi memberikan himbauan dan mengingatkan agar penggunaan dana sesuai aturan yang berlaku dan pelaporan tidak terlambat. Secara teknis, pengawas tidak melakukan pengawasan langsung penggunaan dana sekolah.

Auditor internal pemerintah BPKP dan Inspektorat Daerah Kota Jambi juga memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia apabila dibandingkan dengan banyaknya instansi pemerintah yang harus diawasi. Pengelolaan keuangan sekolah misalnya dana BOS menjadi objek audit internal dari Inspektorat Daerah Kota Jambi karena audit rutin tahunan secara periodik dan audit karena adanya laporan tertentu. Laporan tertentu dapat berasal dari pengaduan orang tua, masyarakat atau karena adanya indikasi permasalahan tertentu. Audit periodik juga tidak dapat dilakukan untuk keseluruhan sekolah, karena keterbatasan sumber daya. Sekolah yang akan

diaudit ditetapkan secara sampling, sehingga tidak semua sekolah setiap tahun akan teraudit.

Faktor Penyebab Belum Optimalnya SPI Pengelolaan Keuangan Sekolah

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara di lapangan, ditemukan beberapa penyebab penerapan SPI belum dapat optimal diterapkan di sekolah, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. Kebijakan moratorium penerimaan PNS di beberapa daerah baik untuk tenaga pendidik dan kependidikan menjadikan jumlah sumber daya manusia di sekolah khususnya sekolah dasar terbatas. Setelah penerimaan PNS sudah dilakukan, jumlah penerimaan tidak sebanding dengan yang sudah pensiun. Sehingga untuk sekolah dasar di Kota Jambi, tenaga pendidik dan kependidikan non PNS cukup banyak. Sekolah khususnya sekolah dengan jumlah siswa sedikit juga memiliki keterbatasan untuk menerima tenaga non PNS. Selain itu juga ditemukan keterbatasan dari sisi kualitas SDM, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Sekolah masih terbatas memiliki SDM yang dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
2. Keterbatasan auditor internal dan pengawas pengelolaan keuangan sekolah. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kota Jambi merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kota Jambi juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana sekolah. Suatu masalah yang dihadapi adalah jumlah SDM auditor yang masih terbatas. Selain itu, latar belakang pendidikan auditor multidisiplin ilmu, tidak semua auditor berlatar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi. Strategi yang dilakukan adalah dengan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme auditor internal. Pelatihan audit dapat memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor (Siti Rahayu & Gudono, 2016). Auditor internal yang profesional akan mampu mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Auditor internal akan menjadi kawan bagi instansi pemerintah, dan bukannya lawan. Karena auditor internal membantu instansi pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, melakukan pengawasan, dan berupaya memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat membantu pimpinan mencapai kegiatan yang bersifat ekonomis, efisiensi, dan efektif (Rahayu dan Rahayu, 2016). Alternatif pengawasan pengelolaan keuangan sekolah dilakukan oleh pengawas sekolah. Namun saat ini,

Fokus pengawasan dominan pada bidang akademik sekolah. Ke depan, pengawas sekolah dapat diberdayakan untuk membantu proses pengawasan dan audit internal sekolah. Pengawas sekolah diberikan pelatihan dan bimbingan teknis terlebih dahulu terkait peraturan dan teknik pengawasan pengelolaan keuangan sekolah. Pengawas sekolah dapat membantu tugas Inspektorat Daerah.

3. Sekolah belum tertib mendokumentasikan penerapan SPI. Dokumentasi atas penerapan praktik pengendalian internal pemerintah di sekolah, belum terdukung dengan dokumentasi yang baik. Misalnya otorisasi masih sering terabaikan untuk didokumentasikan. Proses komunikasi antara atasan dan bawahan lebih banyak bersifat lisan tanpa bukti tertulis.

4. Kesimpulan

Sekolah saat ini bukan hanya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan saja, tetapi juga diberikan otonomi untuk mengelola dana yang dialokasikan ke sekolah. Beberapa jenis dana yang dapat menjadi sumber keuangan sekolah yaitu dana bantuan pemerintah (Bantah), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN (pusat) dan Dana bantuan operasional sekolah dari APBD (daerah) serta pendapatan asli sekolah (PAS). Alur pengelolaan dana sekolah sama dengan organisasi pemerintah lainnya, mulai dari proses penyusunan rencana kerja anggaran sekolah sampai dengan pertanggungjawaban keuangan.

Penerapan pengendalian internal pengelolaan keuangan sekolah di Kota Jambi sudah baik. Hal ini dikarenakan seluruh unsur pengendalian internal telah diterapkan oleh sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Penerapan tertinggi pada unsur lingkungan pengendalian, sedangkan penerapan terendah pada unsur pemantauan. Penyebab SPI belum optimal diterapkan antara lain karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan auditor internal dan pengawas pengelolaan keuangan sekolah dan belum tertibnya dokumentasi penerapan SPI.

Daftar Pustaka

- [1] Afiah, N. N., & Rahmatika, D. N. (2014). Factors influencing the Quality of Financial Reporting and its implication on Good Government Governance (Research on Local Government Indonesia). *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(1 (December)).
- [2] Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2003). *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- [3] BPK. (2015). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan*

- Semester 1 Tahun 2015. Jakarta.
- [4] Defriyan, A. (2010). *Pengaruh Kualitas Pengendalian Intern terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Pada Sekolah Menengah, SMP/SMA di Kota Padang*. Strata 2, Universitas Andalas, Padang.
- [5] Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2.
- [6] Halimah, C. (2009). *Pengaruh Pelaksanaan Pengendalian Internal Dinas Pendidikan Kota Bandung terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP di Kota Bandung*. Strata 2, Universitas Padjajaran, Bandung.
- [7] Huffman, W. E. (2001). Human Capital: Education and Agriculture. *Handbook of Agricultural Economics*, 1, 333-381.
- [8] Indriasih, D. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20).
- [9] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- [10] Jogiyanto. (2010). *Metodologi: Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- [11] Kasali, R. (2014). *Let's change!: Kepemimpinan, Keberanian, dan Perubahan*: Penerbit Buku Kompas.
- [12] Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- [13] Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- [14] Kurniawan, A. (2015). *Audit Internal Nilai Tambah bagi Organisasi*. Yogyakarta: BPFE
- [15] Lanjouw, P., Pradhan, M., Saadah, F., Sayed, H., & Sparrow, R. (2001). *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. worldbank.
- [16] Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [17] Merriam, S. B. (2002). Assessing and Evaluating Qualitative Research. In S. B. M. a. A. (Ed.) (Ed.), *Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- [18] Rahayu, & Rahayu, S. (2016). *The Role of Internal Auditor Government to Realize the Clean Local Government*. Paper presented at the Malaysia Indonesia International Conference of Economics, Management and Accounting (MIICEMA) 2016, Jambi.
- [19] Rahayu, S. (2016). Institutionalization Process of SOA Funds Budgeting at Basic Education Institutions in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(4).
- [20] Rahayu, S., & Gudono. (2016). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan: Sebuah Riset Campuran dengan Pendekatan Sekuensial Eksplanatif*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- [21] Rahayu, S., L, U., I, G., & Nurkholis. (2015). Three Budgeting Pattern of School Operational Assistance Fund. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 9(27 August), 553-559.
- [22] Rahayu, S., Ludigdo, U., & Irianto, G. (2015). Budgeting of School Operational Assistance Fund Based on The Value of Gotong Royong. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 364-369.
- [23] Rahayu, S., Mukhzarudfa, & Yuliusman. (2016). *Praktik Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah*. Penelitian Kelompok. Program Magister Ilmu Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Jambi.
- [24] Saraswati, E. (2011). *Dampak Efisiensi Belanja Publik Pendidikan terhadap Kesejahteraan (Welfare)*. Program Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta.

- [25] Sawyer, L. B., DITTENHOFER, B., Scheiner, J. H., & James, H. (2003). *Audit Internal Sawyer*. Jakarta: Salemba Empat.
- [26] Schultz, T. P., Tansel, A., & Mundial, B. (1993). *Measurement of Returns to Adult Health: Morbidity Effects on Wage Rates in Côte d'Ivoire and Ghana*: World Bank.
- [27] Sudiarianti, N. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis, Universitas Udayana, Denpasar.
- [28] Tunggal, A. W. (2014). *Mengenal Audit Internal Kotemporer*. Jakarta: Harvarindo.